SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN SEKADAU

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Kajian Kebijakan Publik

Oleh :

Yulmia Parlina
E1011171036

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2023

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: http:/jurmafis.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap	: YULMIA PARLINA
NIM / Periode lulus	: E1011171036 / 2023
Tanggal Lulus	: 1 Maret 2023
Fakultas/ Jurusan	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
E-mail addres/ HP	: yulmiaparlina@student.untan.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa .....PublicA.....*) pada Program Studi .Ilmu Administrasi Publik..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**) :

Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kabupaten Sekadau

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltex*
■ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal .....PublikA.....

Dr. Ira Patriani, S.I.P., M.Si
NIP. 19761130200312 2001

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 20/06/2023

Yulmia Parlina
NIM. E1011171036

Catatan :
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(PublikA/Governance/Aspirasi/Komunika/Sovereign /Sociodev/Sociologique/Cala Etnika)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN SEKADAU

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Yulmia Parlina
NIM. E.10111736

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr.Ira Patriani,S.I.P.,M.Si
NIP. 197611302003122001

Tanggal : 30/1/2022

Dosen Pembimbing Pendamping

Dr. Pardi, M.AB
NIP. 197209052002121003

Tanggal : 17/2/2023

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN SEKADAU

Oleh:

Yulmia Parlina
NIM. E.10111736

Dipertahankan di :
Pada hari/tanggal : Rabu/ 1 Maret 2023
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang 1

Tim Penguji:

Ketua	**Sekretaris**
Dr.Ira Patriani,S.I.P.,M.Si	Dr. Pardi, M.AB
NIP. 197611302003122001	NIP. 197209052002121003

Pembahas Utama	**Pembahas Kedua**
Dr. Zulkarnaen, M.Si	Deni Darmawan, S.E, M.Si
NIP. 196402081988101001	NIP. 197306092007011001

Disahkan oleh:
Dekan FIsip Untan

Dr. Herlan, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Yulmia Parlina : Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Sekadau. Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak 2023.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Sekadau sesuai dengan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 19 Tahun 2021. Permasalahan mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini menarik untuk diteliti mengingat layanan SPBE yang sudah disediakan tetapi masyarakat belum memanfaatkan layanan yang tersedia. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan teori Charles O. Jones dalam proses implementasi yaitu Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi dengan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Sekadau sudah memberikan dampak yang cukup baik bagi masyarakat. Namun dalam pelaksanaanya masyarakat belum memberikan umpan balik terhadap layanan yang sudah disediakan. Saran untuk penelitian ini adalah pemerintah lebih gencar dalam memberikan sosialisasi mengenai kebijakan SPBE.

Kata kunci: Implementasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kabupaten Sekadau

ABSTRACT

Yulmia Parlina: The Implementation of the Policy of Regent Regulation Number 19 of 2021 on the Electronic-based Government System in Sekadau Regency. Thesis, Public Administration Study Program of Social and Political Sciences Faculty of Universitas Tanjungpura Pontianak 2023.

This study aimed to describe the process of implementing the Electronic-based Government System Policy (SPBE) in Sekadau Regency in accordance with the Regent Regulation Number 19 of 2021. The problem regarding the implementation of the Electronic-based Government System Policy was interesting to be examined because the SPBE service had been provided, however, the community had not utilized the services provided. This study used Charles O. Jones' theory which consisted of organization, interpretation, and application in the implementation process. This study also used the qualitative approach and descriptive research design. The results of this study showed that the implementation of the Electronic-based Government System in Sekadau Regency already had a pretty good impact on the community. However, in its implementation, the community had not provided feedback on the services that had been provided. The researcher suggests that the government is more aggressive in providing socialization regarding the SPBE policy.

Keywords: Implementation, Electronic-based Government System, Sekadau Regency

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA UPT. BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Sekadau”. Judul ini dipilih karena dalam Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Sekadau dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sosialisasi kepada pengguna SPBE belum merata dilakukan dan kurangnya pengawasan dan pemanfaatan aplikasi yang ada sehingga layanan yang ada tidak efektif dan efisien. Penelitian ini memfokuskan pada proses implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 27 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Sekadau. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 27 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Sekadau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif yakni untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena yang diteliti.

Hasil penelitian ini berdasarkan teori Charles O. Jones (1996: 296) terdiri dari tiga aspek diantaranya, organisasi, interpretasi dan aplikasi. Dalam proses pelaksanaan layanan SPBE di Kabupaten Sekadau kemampuan sumber daya manusia secara kuantitas belum mencukupi dan secara kualitas masih perlu adannya peningkatan kompetensi di bidang teknologi dan informasi. Begitu pula dengan jaringan intra daerah Kabupaten Sekadau yang tidak sama sekali dimiliki

untuk menunjang keberlangsungan pelaksanaan layanan SPBE sehingga menghambat jalannya kebijakan. Kemudian ketidaktahuan masyarakat akan keberadaan layanan SPBE berpengaruh terhadap aktifitas belum sepenuhnya masyarakat memanfaatkan layanan SPBE dikarenakan belum adanya dilakukan sosialisasi oleh pemerintah kabupaten sekadau. Selain itu tim koordinasi yang sudah dibentuk kurang getol dalam berkomunikasi mengenai pelaksanaan layanan SPBE di Kabupaten Sekadau.

Saran untuk penelitian ini adalah dalam Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Sekadau perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi dan informasi. Selanjutnya lebih gencar melakukan sosialisasi kepada pengguna SPBE sehingga aplikasi layanan yang sudah tersedia jadi efektif dan efisien dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan adanya evaluasi perbaikan oleh pengguna SPBE dan pemerintah melakukan peningkatan dalam memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Kemudian meningkatkan komunikasi antar SKPD dan tim koordinasi supaya pelaksanaan SPBE bisa mencapai integrasi berbagi pakai data dan mencapai tujuan yang diharapkan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Yulmia Parlina
Nomor Induk Mahasiswa	: E1011171036
Program Studi	: Ilmu Administasi Publik
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, 08 Februari 2023
Yang membuat Pernyataan



YULMIA PARLINA
NIM E1011171036

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

You will surely succeed, try one more time!

Persembahan:

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Dengan rahmat hidayah dan ridho-Nya dan atas dukungan serta do'a dari orang tercinta skripsi ini dapat diseselaikan. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan syukur saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT hanya atas izin dan karunianya maka skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan pada waktunya.
2. Orang tua tercinta saya yaitu Bapak dan Ibu Saya yang selalu memberikan dukungan moril dan materil serta do'a yang tiada henti untuk kelancaran dan kesuksesan Saya dalam penulisan skripsi ini, karena tiada kata seindah do'a dan tiada do'a yang paling mustajab selain do'a yang dipanjatkan oleh kedua orang tua.
3. Adik saya Rafa dan Tisa yang telah memberikan dukungan, mendoakan serta memberi semangat kepada Saya.
4. Saudara/I Indun, Miw, Indah, Tari, Chi Chi, Fyra, Nana sebagai sahabat yang telah banyak membantu, selalu berada disisi saya, mendoakan dan memberikan semangat kepada saya dalam menyusun skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kabupaten Sekadau".

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnnya penulis menyadari akan kekurangan dari penulisan skripsi ini, karena hasil yang dicapai melalui skripsi ini baru merupakan langkah awal dari suatu perjuangan panjang khasanah ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan.

Keberhasilan dalam penulisan ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Herlan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Ira Patriani, S.I.P., M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Pardi, M.AB selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan saran, arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

3. Dr. Zulkarnaen, M.Si selaku Penguji Utama dan Deni Darmawan, S.E, M.Si selaku Penguji Kedua yang telah banyak memberikan masukan guna kesempurnaan dalam skripsi ini.
4. Dra. Kartika Ningtias, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA)
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis dalam proses perkuliahan.
6. Seluruh pelaksana dan penerima Kebijakan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Sekadau yang sudah bersedia menjadi informan penelitian.
7. Rekan-rekan seangkatan Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan semangat dalam penulisan ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang pantas atas kebaikan dan bantuannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan penelitian ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua yang memerlukannya.

Pontianak, 18 Februari 2022
Penulis,

Yulmia Parlina
E.1011171036

DAFTAR ISI

halaman

Cover .....

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

ABSTRAK ..... **iii**

ABSTRACT ..... **iv**

RINGKASAN SKRIPSI ..... **v**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Identifikasi Masalah 7

1.3. Fokus Penelitian 7

1.4. Rumusan Masalah 7

1.5. Tujuan Penelitian 8

1.6. Manfaat Penelitian 8

BAB II **10**

TINJAUAN PUSTAKA **10**

2.1. Teori 10

2.1.1. Kebijakan Publik 10

2.1.2. Implementasi Kebijakan Publik 12

2.1.3. Model Implementasi Kebijakan 14

1.2. Hasil Penelitian Relevan 22

2.2. Alur Pikir Penelitian 26

2.2.1. Pengertian Kerangka Pikir 26

2.3. Pertanyaan Penelitian 29

BAB III **30**

METODE PENELITIAN **30**

3.1. Jenis Penelitian 30

3.2. Langkah-langkah Penelitian 31

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 33
3.3.1. Lokasi Penelitian 33
3.3.2. Waktu Penelitian 34
3.4. Subjek dan Objek Penelitian 35
3.4.1. Subjek Penelitian 35
3.4.2. Objek Penelitian 36
3.5. Teknik Pengumpulan Data 36
3.5.1. Observasi 37
3.5.2. Wawancara 36
3.5.3. Dokumentasi 38
3.6. Instrumen Pengumpulan Data 38
3.6.1. Analisis Data 39
3.7. Teknik Keabsahan Data 40
BAB IV 42
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 42
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Sekadau 42
4.1.1. Sejarah Kabupaten Sekadau 42
4.1.2. Keadaan Geografis 42
4.2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau 43
4.2.1. Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau 43
4.2.2. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau 45
4.2.3. Struktur Pengurus Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau 46
4.2.4. Tugas dan Fungsi 48
BAB V 72
HASIL DAN PEMBAHASAN 72
5.1. Deskripsi Hasil Penelitian 72
5.2. Analisis 73
5.2.1. Organisasi 73
5.2.2. Interpretasi 79
5.2.3. Aplikasi 83
BAB VI 89
PENUTUP 89
6.1. Kesimpulan 89
6.2. Saran 91
DAFTAR PUSTAKA 92

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Daftar Aplikasi Layanan SPBE Kabupaten Sekadau	6
2.1	Penelitian Yang Relevan	28
3.1	Jadwal Penelitian	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar Judul Halaman

2.1 Alur Pikir Penelitian.....32

5.1 Laman *Website* Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Sekadau.....86

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laju perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberi dampak besar bagi kehidupan manusia. Hal ini tak dapat dihindari, karena fleksibilitas dan kemampuan teknologi yang saat ini mampu memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan segala aktivitasnya dan memperoleh informasi secara cepat. Kemudahan yang didapat, menjadikan kebutuhan teknonogi informasi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh sektor pemerintah. Secara perlahan pola berinteraksi dan bekerja baik antar masyarakat maupun pemerintah dengan masyarakat mulai mengalami perubahan, tak terkecuali dalam sebuah pelayanan, hal ini menjadi salah satu tanggungjawab aparatur pemerintah untuk bisa menyesuaikan perkembangan zaman melalui penyediaan informasi dan pola komunikasi yang lebih baik, dalam rangka menciptakan pelayanan berbasis elektronik dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pemerintah Indonesia, telah mengoptimalkan pemanfaatan TIK di berbagai instansi pemerintah, untuk memenuhi tuntutan transparansi serta pelayanan publik yang cepat, mudah, dan murah, yang selanjutnya diatur melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, dengan adanya INPRES tersebut dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Namun,

dalam pelaksanaannya permasalahan yang muncul yaitu disintegrasi data atau belum tersinkronisasi data antar instansi akibat dari penggunaan platform aplikasi maupun database yang beragam yang digunakan masing-masing instansi. Sehingga hal ini dinilai memberikan efek merugikan bagi penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya yaitu kecepatan pelayanan yang diberikan tidak maksimal (Oktavian Panji S. 2021:53).

Upaya untuk menguatkan landasan penerapan *E-Government* di Indonesia diwujudkan melalui strategi dan kebijakan nasional pengembangan SPBE yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam PERPRES tersebut antara lain dijelaskan tingkat adopsi TIK oleh pemerintahan dituntut untuk bisa sampai pada level integritas, baik integrasi antar-OPD, antar pemerintah daerah, serta antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau biasa disebut *e-government* di Indonesia difokuskan pada pembuatan berbagai aplikasi untuk pelayanan *Government to Government* (G2G), *Government to Bussiness* (G2B), *Government to Employee* (G2E), *Government to Citisen* (G2C) yang terintegrasi.

SPBE dinilai sebagai teknologi yang tepat digunakan untuk efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. SPBE adalah guna mewujudkan tata kelola yang dapat diandalkan dan terpercaya serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan keserasian dalam fungsi penyelenggaraan pemerintah. Selain itu terdapat keuntungan lain dari penggunaan SPBE terhadap pelayanan publik oleh institusi pemerintah seperti, peningkatan

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, berkurangnya kasus korupsi, serta berkurangnya beban biaya operasional pemerintahan karena fungsi pengawasan yang semakin mudah dilakukan oleh masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.

Kabupaten Sekadau sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan Barat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan menggunakan teknologi telah menindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau. Salah satu aspek yang menjadi tujuan penerapan SPBE adalah mewujudkan layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi dan berkualitas yang mampu mendukung kegiatan dan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sekadau.

Sebagai tahap awal penerapan layanan SPBE pada pemerintahan daerah Kabupaten Sekadau ialah laman *website* www.sekadau.kab.go.id yang dapat diakses oleh Pengguna SPBE dengan mudah dan cepat. Keberadaan laman *website* tersebut bertujuan untuk mempermudah Pengguna SPBE dalam mengakses layanan yang dibutuhkan dalam 24 jam melalui pelayanan pemerintah yang saling terhubung, pengadaan laman *website* tersebut dapat membantu mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi dan menurunkan biaya administrasi. Manfaat lainnya yaitu, Pengguna SPBE tidak lagi harus mengantre atau mendatangi kantor pemerintah secara langsung untuk memperoleh layanan sehingga dapat mengakses informasi dimanapun dan kapanpun.

Berdasarkan informasi yang dihimpun penulis saat *pra survey*, penerapan layanan SPBE terbagi menjadi Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Aplikasi Layanan Kabupaten Sekadau dapat dilihat dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Daftar Aplikasi Layanan SPBE Kabupaten Sekadau

A. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		
No	**Nama Operation**	**Keterangan**
1.	SRIKANDI	Layanan Di Bidang Kearsipan Dinamis
2.	SIPKD	Layanan Keuangan
3.	SPSE	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
4.	SIMATA	Layanan Kepegawaian
B. Layanan Publik Berbasis Elektronik		
No	**Nama Operation**	**Keterangan**
1.	Portal Satu Data Sekadau	Layanan Data Terbuka
2.	LAPOR!	Layanan Pengaduan Layanan Publik

Sumber : *diolah penulis berdasarkan data Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Sekadau 2021*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau. Layanan SPBE mampu memberikan pertukaran informasi dan mampu berkolaborasi dengan layanan lainnya. Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan berjalannya waktu dan berprosesnya penerapan layanan SPBE di Kabupaten Sekadau tenyata banyak didapati berbagai kelemahan.

Fungsi layanan SPBE adalah untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan pengguna layanan.

Dikarenakan aplikasi ini masih dalam masa pengembangan, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara penggunaan aplikasi untuk pelayanan pengaduan, menerima serta memanfaatkan layanan yang tersedia. Aplikasi yang ada masih belum bisa berjalan dengan baik, salah satu masalah dimana masih terdapat informasi yang tidak diperbarui secara berkala sehingga saat mencari data dan informasi harus mendatangi kantor pemerintahan yang menjadi tidak efektif dan efisien. Berbagai persoalan yang muncul tersebut adalah sebagai akibat kurang optimalnya pengawasan aplikasi layanan SPBE.

Untuk meningkatkan efisiensi dan juga memperbaiki pelayanan SPBE masyarakat diminta untuk lebih berperan aktif dalam pengelolaan dan penggunaan aplikasi dengan memberikan umpan balik kepada penyedia layanan, baik dari sektor privat maupun publik. Pada permasalahan pelayanan masyarakat merupakan pilar penting yang sangat berpengaruh yaitu sebagai objek yang diberikan jasa pelayanan. Dengan adanya inovasi layanan SPBE diharapkan masyarakat bisa melakukan pengaduan yang ada di lingkungannya sesuai dengan prosedur yang ada.

Dalam kenyataannya, fenomena menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan tentang SPBE di Kabupaten Sekadau belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sosialisasi yang dilakukan juga belum merata pada masyarakat Kabupaten Sekadau. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki informasi, bingung dalam memperoleh prosedur pelayanan, bahkan memiliki keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik. Untuk itu diharapkan pemerintah lebih gencar lagi dalam mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan

SPBE ini. Implementasi kebijakan SPBE ini merupakan kerja kognitif yang membutuhkan sinergi, koordinasi dan kolaborasi antar SKPD untuk itu dibutuhkan lingkungan yang saling mendukung dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk mengakses layanan dan bisa mencapai integrasi berbagi pakai data oleh pengguna di Kabupaten Sekadau.

Berangkat dari uraian diatas bahwa laju perkembangan teknologi dan informasi yang bergabung dan menyatu dapat menciptakan ekosistem yang semakin kuat dan merusak jika tidak diminimalkan. Oleh kerena itu penerapan SPBE harus dilaksanakan secara serius yang pada akhirnya memberikan keunggunlan kompetitif secara nasional bagi Kabupaten Sekadau. Maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai proses berjalannya implementasi kebijakan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau sebagai implementor dari Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1.2.Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan peneliti menemukan beberapa indikasi masalah yaitu :

1. Kurangnya pemanfaatan dan pengawasan aplikasi yang ada sehingga masih terdapat aplikasi yang informasinya tidak diperbarui secara berkala.
2. Sosialisasi dan koordinasi penerapan SPBE antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau masih kurang baik, sehingga memperlihatkan bahwa layanan SPBE belum sepenuhnya berhasil.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang teknologi dan informasi masih terbatas, sehingga masih terdapat aplikasi yang tidak beroperasi secara maksimal.

1.3.Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan indikasi permasalahan yang telah ditemukan di atas, maka penulis telah membatasi fokus penelitian pada “proses implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 27 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Sekadau”.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penulisan diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu: Bagaimana proses Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 27 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Sekadau?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis proses Implementasi Kebijakan Pasal 27 Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Sekadau.

1.6.Manfaat Penelitian

Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah:

a) Aspek Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan ilmu administrasi publik, khususnya mengenai kajian kebijakan publik, serta memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi penulis yang mengambil permasalahan yang sama karena penelitian ini berkaitan dengan mata kuliah studi implementasi kebijakan publik. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk dijadikan informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

b) Aspek praktis

1. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan dan gambaran pemerintah dalam mengembangkan pelaksanaan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik agar kedepannya lebih optimal.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai penyedia informasi data yang berkualitas dan terpercaya dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memantau pernerapan SPBE.

3. Bagi Penulis

Penulis dapat mengetahui mengenai proses Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang dapat diandalkan dan terpercaya bagi pengguna SPBE di Kabupaten Sekadau.